



Laporan Bulanan

Badan Pengarah Papua

FEBRUARI 2025

Laporan Operasional & Kegiatan

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

Provinsi Papua Barat



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga, penyusunan Laporan Bulanan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Daya dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan laporan operasional dan kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya periode bulan Februari 2025. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan, realisasi dan kinerja BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

Demikian, semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Sorong, 10 Maret 2025

Anggota BP3OKP

Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya,



SEKRETARIAT
BP3OKP
PAPUA BARAT DAYA

Drs. Otto Ihatau, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Maksud & Tujuan	4
1.2 Ringkasan Kelembagaan	4
1.2.1 Landasan/Dasar Aturan.....	4
1.2.2 Definisi	5
1.2.3 Struktur Kelembagaan.....	5
1.2.4 Tugas dan Fungsi.....	5
1.2.5 Sumber Daya Manusia Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya	6
1.2.6 Sarana & Prasarana Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya	7
BAB II KEGIATAN DAN CAPAIAN	8
2.1 Rekapitulasi Kegiatan	8
2.2 Capaian	37
BAB III PENUTUP	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud & Tujuan

Laporan ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai laporan rutin yang dilaporkan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Badan Pengarah Papua (BPP), Sekretaris Eksekutif Badan Pengarah Papua (BPP), Kepala Sekretariat BPP Provinsi Jayapura (selaku koordinator Sekretariat BPP), serta Kepala Sekretariat BPP Sorong (KPPN Sorong selaku Tim Dukungan Administratif Sekretariat BPP/BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya).

Tujuan dari disusunnya laporan ini antara lain :

- 1) Sebagai sarana pemantauan pelaksanaan kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya periode bulan Februari 2025.
- 2) Sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya pada bulan Februari 2025.
- 3) Sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan/ atau program kerja, penyelenggaraan dan evaluasi kerja BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya untuk bulan yang akan datang.
- 4) Sebagai laporan operasional Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya.

1.2 Ringkasan Kelembagaan

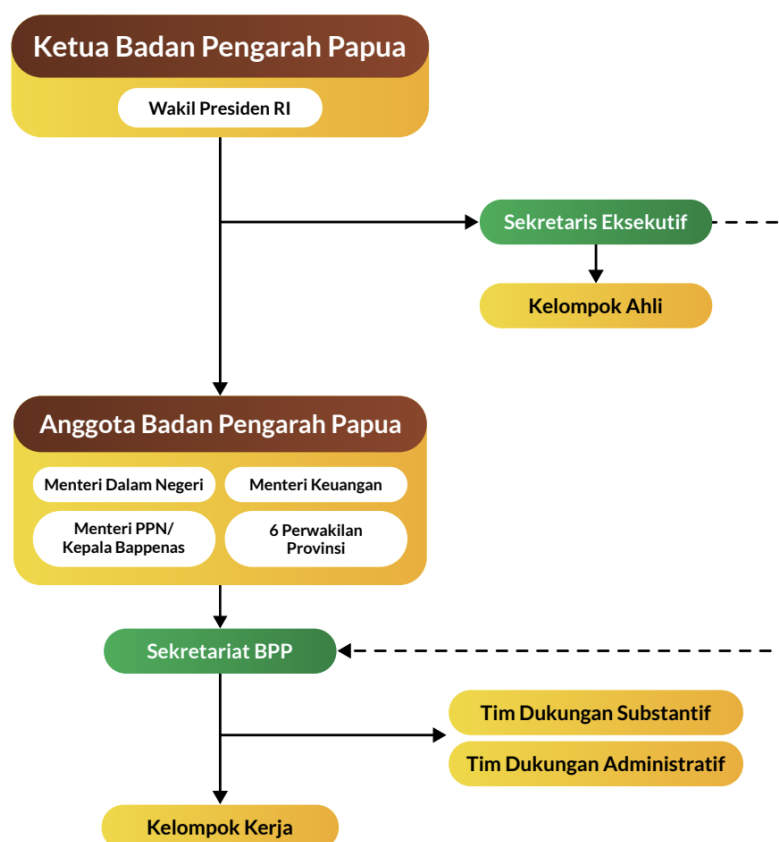
1.2.1 Landasan/Dasar Aturan

- 1) Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
- 2) Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
- 3) Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua.
- 4) Keputusan Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggota Kelompok Kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

1.2.2 Definisi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1 : Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2 : Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

1.2.3 Struktur Kelembagaan



1.2.4 Tugas dan Fungsi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi :
- Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;
 - Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;
 - Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

1.2.5 Sumber Daya Manusia Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya

Ringkasan jumlah sumber daya manusia yang ada di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya antara lain :

No	Unit Kerja	Jumlah (Orang)
1	Pimpinan (Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya)	1
2	Kelompok Kerja	
	Papua Sehat	1
	Papua Cerdas	1
	Papua Produktif	1
	Papua Polhukam/Damai	1 (Nonaktif)
3	KPPN Sorong sebagai Tim Dukungan Administratif	5
4	Staf PPNPN	3
Jumlah		13

1.2.6 Sarana & Prasarana Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya

No	Uraian	Jumlah (Unit/Set) / Keterangan
A	Bangunan	1 Unit (Milik GKN Sorong)
B	Ruangan	
	Front Office	1 Unit
	Ruang Rapat	1 Unit
	Ruang Kerja Pimpinan/Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya	1 Unit
	Ruang Istirahat Pimpinan/ Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya	1 Unit
	Ruang Dapur	1 Unit
	Ruang Kamar Mandi/Toilet	2 Unit
C	Peralatan dan Perlengkapan	
	Meja Kerja	10 Unit
	Kursi Kerja	10 Unit
	Meja Rapat	1 Unit
	Kursi Rapat	9 Unit
	Meja Tamu	1 Unit
	Kursi Tamu	3 Unit
	AC	5 Unit
	Printer	2 Unit
	Laptop	7 Unit
	Sofa Tamu	1 Set
	Smart TV	3 Unit
	Meja dan Kursi Makan	1 Set
	Kulkas	1 Unit
	Kompor Listrik	1 Unit
	Dispenser	2 Unit
	Mesin Kopi	1 Unit
	Jam Dinding	3 Unit
	Kitchen Set	1 Set
	CCTV	4 Unit
	Lemari Arsip	1 Unit
	Lemari Kamar	1 Unit
	Tempat Tidur	1 Unit
	Rak Piring Kecil	2 Unit
	Starlink	1 Unit
	Hardisk	2 Unit
	ATK (Stapler, Gunting, Penggaris, dll)	Tersedia
	Peralatan Makan (Piring, Sendok, dll)	Tersedia

BAB II

KEGIATAN DAN CAPAIAN

2.1 Rekapitulasi Kegiatan

Rekapitulasi kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya pada bulan Februari tahun 2025, antara lain :

1) Kegiatan 1

Nama Kegiatan	Rapat Konfirmasi Mengenai Tanah Hibah Program Pembangunan 3 Juta Rumah
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	03 Februari 2025 di Aula KPPN Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tindaklanjut Surat Sekretariat Wakil Presiden RI Nomor R-01/SWP/D-3/PKHHAM/KN.01.00/01/2025 tanggal 23 Januari 2025, BP3OKP PBD melaksanakan Rapat (Topik: Konfirmasi Mengenai Tanah Hibah Program Pembangunan 3 Juta Rumah)
Peserta Kegiatan	Anggota BP3OKP PBD; Anggota Pokja BP3OKP PBD (Sehat, Cerdas, Produktif); Pemda Kab. Sorong; Pemda Kab. Raja Ampat; BPN Kab. Sorong; BPN Kab. Raja Ampat; MPG; Masyarakat Penghibah Tanah
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP
Hasil Kegiatan	1. Pemerintah daerah Kabupaten Sorong belum menerima informasi terstruktur dan resmi mengenai program pembangunan 3 juta rumah dan belum menerima informasi terkait data tanah yang dihibahkan serta siap mendukung dan mengikuti program pembangunan 3 juta rumah dan ada beberapa distrik yang teridentifikasi membutuhkan pembangunan rumah layak huni seperti Distrik Sayosa Timur 2. Pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat menyampaikan informasi terkait tersedianya lahan untuk program pembangunan 3 juta rumah yang dibuktikan dengan pernyataan kepemilikan tanah

	namun, beberapa diantaranya belum memiliki sertifikat rumah 3. BPN Kabupaten Sorong belum menerima informasi/belum adanya sinkronisasi kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Daerah terkait <i>Roadmap</i> program pembangunan 3 juta rumah 4. BPN Kabupaten Raja Ampat siap mendukung pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat untuk berkolaborasi dalam program pembangunan 3 juta rumah 5. Masyarakat penghibah tanah menyampaikan bahwa beberapa tanah belum memiliki sertifikat dan mereka sangat antusias menunggu realisasi program pembangunan 3 juta rumah tersebut
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Usulan yang disampaikan melalui organisasi MPG (Masyarakat Pendukung Gibran) hendaknya perlu dilakukan verifikasi dan validasi secara teliti oleh tim terkait untuk menghindari terjadinya konflik di kemudian hari 2. Perlu adanya regulasi yang mengatur terkait <i>Roadmap</i> program pembangunan 3 juta rumah 3. Pengusulan tanah hibah perlu mendapatkan pengakuan/persetujuan hak adat dari lembaga adat 4. Perlu membentuk tim untuk melakukan komunikasi dan verifikasi lahan/tanah hibah yang diusulkan 5. Perlu penentuan titik GPS dan memastikan sesuai dengan konsep RTRW 6. Perlu identifikasi calon penerima/manfaat program pembangunan 3 juta rumah apabila positif direalisasikan

Dokumentasi



2) Kegiatan 2

Nama Kegiatan	Audiensi Bersama Organisasi Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Masyarakat Pendukung Gibran (MPG)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	04 Februari 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menerima permohonan audiensi dari Ketua DPP MPG
Peserta Kegiatan	Anggota BP3OKP PBD; Anggota Pokja BP3OKP PBD (Produktif); DPP MPG
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP
Hasil Kegiatan	BP3OKP PBD mendapatkan informasi mengenai organisasi MPG (Masyarakat Pendukung Gibran). Di tingkat pusat MPG diketuai oleh Pak Jimmy Sidabutar. MPG juga telah melakukan koordinasi dengan 2 kabupaten yakni

	Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat dengan ruang lingkup koordinasi yakni identifikasi pemilik lahan, kelengkapan dokumen/berkas terkait kesediaan penyiapan lahan oleh pemilik lahan untuk selanjutnya dijadikan sebagai salah satu syarat pengusulan pembangunan rumah
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. BP3OKP PBD akan melakukan koordinasi tindaklanjut dan memberikan laporan kepada Asisten Deputi Bidang Politik, Keamanan, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Wakil Presiden terkait informasi profil organisasi MPG, status organisasi MPG, dan memberikan laporan singkat terkait kegiatan awal yang telah dilakukan bersama organisasi MPG terkait usulan tanah hibah untuk program pembangunan 3 juta rumah 2. Perlu untuk segera mengeluarkan SK untuk DPD MPG di tingkat daerah/provinsi khususnya di Provinsi Papua Barat Daya 3. Organisasi MPG perlu untuk mengkoordinasikan terkait usulan tanah hibah dalam rangka program 3 juta rumah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong maupun Kabupaten Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat Daya
Dokumentasi	

3) Kegiatan 3

Nama Kegiatan	Audiensi Bersama Pengurus RSUD Scholoo Keyen Kab. Sorong Selatan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	04 Februari 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menerima permohonan konsultasi terkait Penutupan RSUD Scholoo Keyen dan Manajemen RS
Peserta Kegiatan	Anggota Pokja BP3OKP PBD (Sehat); Pihak RSUD Scholoo Keyen Kab. Sorong Selatan
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi RIPPP (Sehat)
Hasil Kegiatan	BP3OKP PBD menerima laporan mengenai kekosongan nakes dokter spesialis anak dan satu dokter SpOG yang meninggalkan tempat tugas sebelum masa tugas selesai dikarenakan belum dilakukan pembayaran insentif dan jasa medis/pelayanan per bulan November dan Desember tahun 2024, serta laporan mengenai kekosongan anggaran untuk pembayaran insentif dan jasa nakes di RSUD Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjuti	Perlu adanya komunikasi kepada Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Selatan untuk konfirmasi mengenai permasalahan keterlambatan pembayaran insentif
Dokumentasi	

4) Kegiatan 4

Nama Kegiatan	Rapat Internal BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	05 Februari 2025 di Hotel Aryaduta Menteng Jakarta
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Membahas terkait persiapan kebutuhan Perjalanan Dinas BP3OKP PBD di Jakarta pada akhir bulan Januari s.d. awal bulan Februari tahun 2025

Peserta Kegiatan	Anggota BP3OKP PBD; Anggota Pokja BP3OKP PBD (Sehat, Cerdas, Produktif); PPNNP BP3OKP PBD
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	SHEK Internal
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP dan Misi RIPPP (Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	Tersusunnya jadwal kegiatan (<i>schedule</i>) BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya selama pelaksanaan Perjalanan Dinas di Jakarta
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	-
Dokumentasi	

5) Kegiatan 5

Nama Kegiatan	Rapat/Diskusi Bersama Asisten Deputy Politik, Keamanan, Hukum dan HAM Sekretariat Wakil Presiden RI
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	06 Februari 2025 di Sekretariat Wakil Presiden RI
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Berdiskusi terkait kendala internal BP3OKP, melaporkan hasil konfirmasi tanah hibah untuk program 3 juta rumah di PBD, melaporkan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BP3OKP PBD, dan berkoordinasi terkait pelaksanaan program MBG di PBD
Peserta Kegiatan	Anggota BP3OKP PBD; Anggota Pokja BP3OKP PBD (Sehat, Cerdas, Produktif); Asisten Deputy PKHH SWP (Pak Afif); PPNNP BP3OKP
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP dan Misi RIPPP (Sehat, Cerdas, Produktif)

Hasil Kegiatan	1. BP3OKP PBD menyampaikan terkait kinerja/kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan 2. BP3OKP PBD melaporkan terkait hasil pertemuan/rapat terkait konfirmasi usulan tanah hibah untuk program pembangunan 3 juta rumah yang dikirimkan oleh organisasi MPG (Masyarakat Pendukung Gibran) 3. BP3OKP PBD melaporkan terkait isu strategis pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua Barat Daya 4. BP3OKP PBD meminta dukungan dari Sekretariat Wakil Presiden dalam rangka pelaksanaan tuisi SHEK di Jakarta dengan beberapa K/L yang dilaksanakan pada bulan Februari 2025 5. BP3OKP PBD menyampaikan kendala-kendala internal yang dihadapi seperti, pemberhentian Jabatan Fungsional Anggota Pokja, dsb 6. BP3OKP PBD mendapat apresiasi dari Asdep PKHHAM Sekretariat Wakil Presiden RI 7. Asdep PKHHAM Sekretariat Wakil Presiden RI menyampaikan bahwa, terkait pemberhentian Jabatan Fungsional perlu adanya koordinasi langsung dengan BKN RI dan Kementerian Induk Anggota Pokja (Kemenkes dan Kemendiktisaintek)
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Perlu adanya optimalisasi kinerja Sekretariat Badan Pengarah Papua Jayapura 2. BP3OKP PBD akan berkoordinasi dan berkonsultasi secara langsung dengan BKN RI dan Kementerian Induk Anggota Pokja (Kemenkes dan Kemendiktisaintek/Kemendikdasmen) bagian Biro Sumber Daya Manusia 3. BP3OKP PBD akan berkoordinasi dan berkonsultasi secara langsung dengan BGN terkait mekanisme/petunjuk teknis pelaksanaan program MBG 4. BP3OKP PBD akan berkoordinasi terkait program pembangunan 3 juta rumah kepada Wamendagri

Dokumentasi



6) Kegiatan 6

Nama Kegiatan	Koordinasi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Audiens dan Diskusi)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	06 Februari 2025 di Kantor Wakil Menteri Dalam Negeri
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Membangun sinergitas, memperkenalkan kelembagaan BP3OKP, melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi BP3OKP PBD, berkoordinasi terkait pelaksanaan program MBG di PBD, berkoordinasi terkait isu program pembangunan 3 juta rumah dan isu-isu strategis lainnya
Peserta Kegiatan	Anggota BP3OKP PBD; Anggota Pokja BP3OKP PBD (Sehat, Cerdas, Produktif); Wamendagri (Ibu Ribka Haluk); Staf/Pegawai Kemendagri
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP dan Misi RIPPP (Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	1. BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya mendapatkan apresiasi dari Wamendagri atas kinerja dan pelaksanaan tugas serta fungsi SHEK yang telah dijalankan 2. Wamendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah telah mendesain mekanisme Musrenbang Otsus untuk dilaksanakan pada tahun 2025 ini 3. Progres draft Perpres RAPPP saat ini sedang pada tahapan penetapan oleh Presiden RI. Harapannya

	dapat selesai pada tahun 2025 ini agar dapat segera digunakan
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjuti	1. Perlu adanya penjadwalan pleno BP3OKP 2. BP3OKP memerlukan dukungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga, dimohon agar perangkat struktur yang memperlancar tusi BP3OKP agar dilengkapi dengan serius 3. Perlu adanya petunjuk teknis terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) 4. Perlu adanya perhatian dari OPD dalam penyusunan program. Disesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran dan ketersediaan anggaran 5. Perlu kepastian terkait penetapan Perpres RAPPP 6. Perlu dirumuskan terkait indikator capaian/output program MBG 7. BP3OKP PBD perlu melakukan koordinasi tindaklanjuti terkait program 3 juta rumah 8. BP3OKP PBD akan mengawal pelaksanaan program MBG di Provinsi Papua Barat Daya dengan tetap mengacu pada tusi SHEK
Dokumentasi	 

7) Kegiatan 7

Nama Kegiatan	Konsultasi dan Koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara RI
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	07 Februari 2025 di Badan Kepegawaian Negara RI
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Konsultasi dan koordinasi terkait Pertimbangan Teknis (Pertek) dan SK Penugasan Anggota Pokja BPP PBD
Peserta Kegiatan	Anggota BP3OKP PBD; Anggota Pokja BP3OKP PBD (Sehat, Cerdas, Produktif); Deputi Penyelenggaran Layanan Manajemen ASN, BKN RI (Ibu Martha)
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP dan Misi RIPPP (Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	a. BP3OKP PBD menyampaikan terkait pemberhentian Jabatan Fungsional Anggota Pokja yang diberhentikan b. BP3OKP PBD menyampaikan bahwa bertugas sebagai Anggota Pokja itu sangat luas (fleksibel) sehingga, tidak mengganggu tugas fungsional Anggota Pokja pada instansi asal c. BKN RI menyampaikan bahwa : d. BP3OKP merupakan LNS yang memiliki fleksibilitas tinggi dalam pengelolaan kepegawaian e. Berdasarkan Peraturan MenPAN-RB Nomor 65 Tahun 2020 dan BKN Nomor 16 Tahun 2022, jabatan fungsional ASN/PNS yang ditugaskan di lembaga pemerintah tidak perlu diberhentikan jabatan fungsionalnya apabila linear f. Dalam database Pertek yang diterbitkan BKN, tidak menyebutkan pemberhentian jabatan fungsional g. BKN RI menyarankan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi bersama Kementerian Induk (Kemenkes dan Kemendikisaintek/ Kemendikdasmen) bidang Sumber Daya Manusia
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Perlu bantuan dari BKN RI untuk berkoordinasi dengan Kementerian Induk (Kemenkes dan

	Kemendikdisaintek/Kemendikdasmen) bidang Sumber Daya Manusia 2. Perlu adanya koordinasi tindak lanjut berupa pertemuan/rapat antara Sekretariat Wakil Presiden, Sekeretariat Badan Pengarah Papua Jayapura, BKN RI, MENPAN-RB, K/L Induk/Terkait guna peninjauan kembali dokumen SK Penugasan Anggota Pokja
Dokumentasi	

8) Kegiatan 8

Nama Kegiatan	Konsultasi dan Koordinasi dengan Badan Gizi Nasional
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	10 Februari 2025 di Kantor Badan Gizi Nasional, Kementerian Pertanian RI
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Kordinasi terkait mekanisme/juknis pelaksanaan Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua Barat Daya
Peserta Kegiatan	Anggota BP3OKP PBD; Anggota Pokja BP3OKP PBD (Produktif); Direktur Wilayah I Deputy Penyediaan dan Penyaluran BGN
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP dan Misi RIPPP (Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	1. BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya telah berperan aktif mendorong percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua Barat Daya 2. BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait permohonan

	mekanisme/petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program MBG 3. Respon BGN : - BGN mengapresiasi peran BP3OKP dalam mendukung percepatan pelaksanaan program MBG di Provinsi Papua Barat Daya - BGN mengharapkan adanya kolaborasi dengan BP3OKP untuk mendukung percepatan pelaksanaan program MBG di Provinsi Papua Barat Daya - Petunjuk Teknis (Juknis) segera ditindaklanjuti
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	- Mekanisme/juknis MBG perlu untuk segera dipublikasikan/disampaikan agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan dengan baik, mengingat program MBG ini segera dijalankan di setiap daerah - Pelaksanaan MBG perlu untuk dikolaborasikan dan melibatkan berbagai pihak, seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat
Dokumentasi	

9) Kegiatan 9

Nama Kegiatan	Konsultasi dan Koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	10 Februari 2025 di Kemendikdasmen RI

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Diskusi terkait SK Penugasan Anggota Pokja BPP PBD (Cerdas)
Peserta Kegiatan	Anggota Pokja BP3OKP PBD (Cerdas); Staf/Pegawai Biro Sumber Daya Manusia Kemendikdasmen RI
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP
Hasil Kegiatan	Jabatan Fungsional dalam SK Penugasan Anggota Pokja Papua Cerdas dari Unsur ASN/PNS diberhentikan karena pihak Kementerian Induk (Kemendikbudristek RI) mengira bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota Pokja sangat melekat, dan jam kerjanya full time (terstruktur) dalam artian sejak pagi hingga sore hari (jam kantor) serta tidak dapat ditinggalkan. Namun, kenyataannya, jam kerja Anggota Pokja bersifat fleksibel sehingga, dapat dijalankan bersamaan dengan pekerjaan lain, dalam hal ini yakni pekerjaan sebagai Dosen di Universitas Papua. Berkenaan dengan hal tersebut, pihak Kemendikbudristek RI menyampaikan, diperlukannya pertimbangan dan keputusan bersama antara Sekretaris Eksekutif BP3OKP, BKN dan K/L yang mengeluarkan SK Penugasan serta dapat meminta pertimbangan/rekomendasi dari MENPAN RB terkait pelaksanaan tugas/kerja yang dilaksanakan secara bersamaan.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. BP3OKP PBD menerbitkan surat yang ditujukan kepada Sekretaris Eksekutif BP3OKP dan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Jayapura dengan nomor SPrm-7/SETBP3OKP-PBD/SOQ/II/2025 tanggal 11 Februari 2025 perihal Permohonan Pengaktifan Jabatan Fungsional Anggota Pokja dari Unsur ASN/PNS 2. BP3OKP PBD menerbitkan surat yang ditujukan kepada Kepala BKN RI c.q. Deputi Penyelenggara Layanan Manajemen ASN dengan nomor SPrm-9/SETBP3OKP-PBD/SOQ/II/2025 tanggal 24 Februari 2025 perihal Permohonan Tindaklanjut SK Penugasan Anggota Pokja BPP dari Unsur ASN/PNS

	3. Perlu adanya pertemuan/koordinasi antara Sekretaris Eksekutif BP3OKP, BKN, dan K/L Induk (Penerbit SK Penugasan)
Dokumentasi	

10) Kegiatan 10

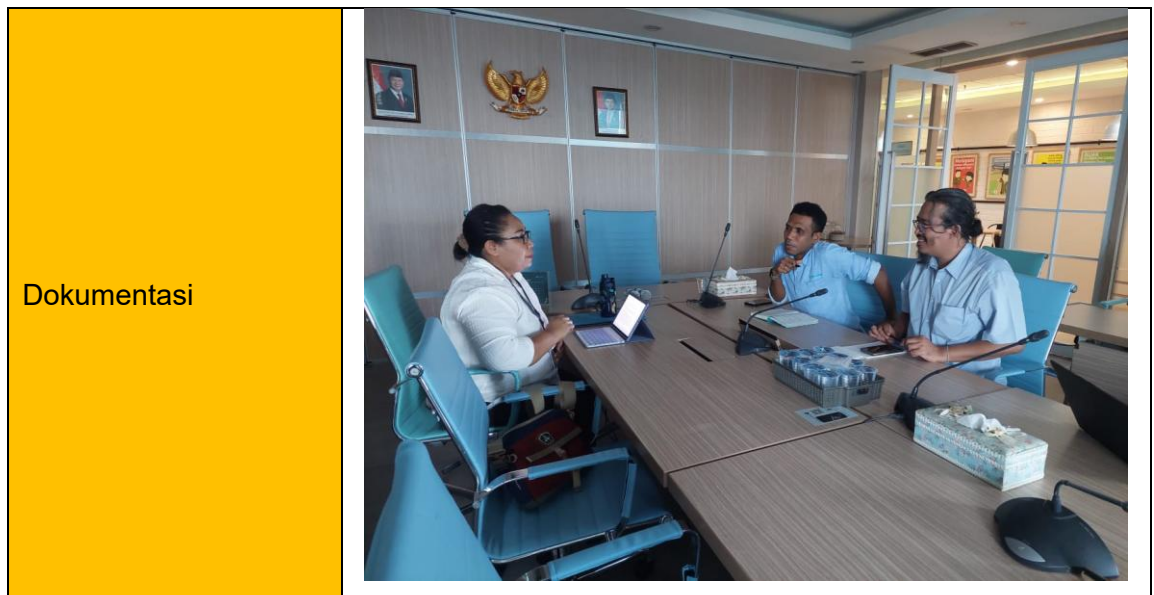
Nama Kegiatan	Konsultasi dan Koordinasi dengan Direktorat Kelembagaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	10 Februari 2025 di Kemendiktisaintek RI
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Konsultasi dan koordinasi terkait pendirian Akademi Komunitas di Provinsi Papua Barat Daya
Peserta Kegiatan	Anggota Pokja BP3OKP PBD (Cerdas); Staf/Pegawai Direktorat Kelembagaan Kemendiktisaintek RI
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi RIPPP (Cerdas)
Hasil Kegiatan	- BP3OKP PBD menyampaikan terkait permohonan arahan mengenai pendirian akademi komunitas di Provinsi Papua Barat Daya - Respon Direktorat Kelembagaan Kemendiktisaintek RI : - Pendirian akademi komunitas perlu kebijakan antar pimpinan mengingat, hingga saat ini moratorium pembukaan PTN/PTS di Indonesia belum dicabut

	b. Pendirian akademi komunitas disarankan/ direkomendasikan yang statusnya Swasta
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Pendirian akademi komunitas dapat dibentuk dengan melakukan analisis awal untuk selanjutnya dipresentasikan/dikonsultasikan dengan Dirjen Kelembagaan Kemendiktisaintek RI 2. Diperlukan kajian mendalam antar pimpinan terkait pendirian akademi komunitas sesuai amanat UU dan pelaksanaan Otonomi Khusus di Tanah Papua 3. Diperlukan komunikasi antar pimpinan untuk mendapatkan kebijakan khusus (<i>special diskresi</i>) mengingat, pendirian akademi komunitas adalah salah satu yang diamanatkan dalam UU Otonomi Khusus dan melalui PP Nomor 106 Tahun 2021 disampaikan bahwa kewenangan pengelolaannya adalah Pemerintah Provinsi
Dokumentasi	

11) Kegiatan 11

Nama Kegiatan	Konsultasi dan Koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes RI
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	10 Februari 2025 di Kemenkes RI
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Membahas terkait Proposal UPT RS Vertikal di Provinsi Papua Barat Daya
Peserta Kegiatan	Anggota Pokja BP3OKP PBD (Sehat); Staf/Pegawai Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes RI

Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi RIPPP (Sehat)
Hasil Kegiatan	BP3OKP PBD menyampaikan terkait beberapa hal : - Memfollow up kembali terkait usulan RS UPT Vertikal Kemenkes di Provinsi Papua Barat Daya - Perlu adanya pengawasan terhadap dana TKD khususnya pada sektor pembangunan kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya - Beberapa pelayanan kesehatan perlu dihadirkan di Provinsi Papua Barat Daya seperti Laboratorium dan <i>Command Center</i> - Perlu dipertimbangkan dengan baik terkait perencanaan pengadaan SDM Kesehatan di wilayah Papua
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	- BP3OKP PBD bersama Gubernur dan Pemda akan mengusulkan dan memfollow up terkait RS UPT Kemenkes di Provinsi Papua Barat Daya - Bupati Tambrau segera membuat permohonan agar dapat dilakukan relokasi kembali Dana Alokasi Khusus yang gagal transfer sebelumnya, serta perlu untuk berkoordinasi dengan Bappenas dan Kemenkeu agar dapat dilakukan justifikasi untuk penganggaran kembali dengan risiko tidak bisa dilaksanakan sekaligus sehingga, perlu adanya <i>cost sharing</i> pembangunan antara Pemerintah Pusat-Daerah-Kabupaten Tambrau - Perlu adanya koordinasi antara Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya dengan Bapperida PBD terkait usulan program kegiatan, sekaligus komunikasi dengan Kementerian Kesehatan



12) Kegiatan 12

Nama Kegiatan	Konsultasi dan Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes RI
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	11 Februari 2025 di Kemenkes RI
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Membahas terkait Kekosongan Pelayanan Dokter Spesialis Anak di RSUD Scholoo Keyen Kab. Sorong Selatan
Peserta Kegiatan	Anggota Pokja BP3OKP PBD (Sehat); Staf/Pegawai Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Kemenkes RI
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP
Hasil Kegiatan	BP3OKP PBD melakukan tugas dan fungsi SHEK yakni evaluasi terhadap program peningkatan akses dan kualitas fasilitas kesehatan baik pelayanan kesehatan primer maupun rujukan sesuai standar dan terakreditasi. Salah satunya adalah, pemenuhan SDM bidang kesehatan, dalam hal ini pelayanan spesialisik yang seharusnya dipenuhi oleh RSUD Scholoo Keyen Kab. Sorong Selatn sebagai komitmen terhadap layanan pada Masyarakat.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Perlu segera dilaksanakan koordinasi antara Pemda dan Kementerian Kesehatan terkait pemenuhan tenaga/SDM dokter spesialis serta penjaminan

	pembiayaan bidang kesehatan untuk mencegah terjadinya pemblokiran terhadap Kabupaten Sorong Selatan sebagai salah satu wilayah penerima layanan tenaga Spesialis dari Kementerian Kesehatan 2. Perlu pengambilan langkah-langkah praktis strategis untuk menyelesaikan permasalahan kekosongan dokter spesialis anak dalam jangka pendek, serta koordinasi dengan Pemda untuk merencanakan langkah-langkah pengadaan dokter spesialis anak dalam jangka panjang
Dokumentasi	

13) Kegiatan 13

Nama Kegiatan	Diskusi Bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	13 Februari 2025 di Kantor LPDP
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Membahas terkait LPDP Afiriasi untuk Putra/Putri Papua
Peserta Kegiatan	Anggota BP3OKP PBD; Anggota BP3OKP Papua Selatan; Pihak LPDP
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi RIIPPP (Cerdas)

Hasil Kegiatan	1. BP3OKP melaksanakan tugas dan fungsi SHEK dengan LPDP terkait Beasiswa LPDP Afirmasi Putra/Putri Papua 2. BP3OKP mendapatkan informasi secara detail terkait beasiswa LPDP afirmasi Putra/i Papua (informasi persyaratan, mekanisme, dll)
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Perlu optimalisasi publikasi terkait informasi beasiswa LPDP afirmasi Putra/i Papua agar dapat menjangkau masyarakat OAP, lebih khusus yang berada/tinggal di kampung-kampung
Dokumentasi	 

14) Kegiatan 14

Nama Kegiatan	Peresmian Kegiatan DAK Fisik dan Non Fisik Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023, 2024 dan 2025
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	17 Februari 2025 di Terminal B Km. 12 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri undangan kegiatan Peresmian kegiatan Fisik dan Non Fisik Pemprov PBD
Peserta Kegiatan	Anggota Pokja BP3OKP PBD (Sehat, Cerdas); Pemda Provinsi PBD; Tamu undangan lainnya

Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Membangun Sinergitas dan Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP
Hasil Kegiatan	Sarana dan prasarana yang dibangun menggunakan DAK tersedia tidak hanya di Kota Sorong saja namun, tersedia juga di Kabupaten/Kabupaten. Tersedia di Kota Sorong sebagai pusat pelaksanaan kegiatan yang dimaksud, dalam hal ini adalah Terminal Tipe B
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Perlu pemanfaatan secara optimal terkait hasil-hasil pembangunan DAK Fisik 2. Pengawasan dan pemeliharaan DAK Fisik perlu menjadi catatan penting, agar aset ini dapat berkelanjutan dan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dapat bermanfaat untuk melayani masyarakat
Dokumentasi	

15) Kegiatan 15

Nama Kegiatan	Simposium Regional Penyiapan Usulan Rancangan Perda Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	18 Februari 2025 di Hotel Rylich Panorama Sorong, Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri undangan kegiatan dengan bahasan terkait Eksistensi Masyarakat Adat Di Pusaran Politik, Hukum,

	Modern, dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Tanpa Prinsip Keberlanjutan
Peserta Kegiatan	Usulan/Calon Anggota Pokja BP3OKP PBD (Alberd Duwith); Pihak Yayasan Bentang Alam Papua PBD; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi Papua Polhukam/Damai
Hasil Kegiatan	Kegiatan ini menghasilkan kesepakatan terkait pentingnya Peraturan Daerah Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua Barat Daya
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Perlu untuk segera dibentuk Tim Lintas Sektor guna mendorong Peraturan Daerah Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua Barat Daya
Dokumentasi	

16) Kegiatan 16

Nama Kegiatan	<i>Focus Group Discussion</i>
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	25 Februari 2025 di Aula KPPN Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri undangan dengan bahasan terkait Alokasi Anggaran Pokja BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
Peserta Kegiatan	Anggota BP3OKP PBD; Anggota Pokja BP3OKP PBD (Sehat, Cerdas, Produktif); KPPN Sorong

Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP
Hasil Kegiatan	1. BP3OKP PBD mendapatkan penjelasan terkait peran KPPN Sorong selaku Tim Dukungan Administratif Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya 2. BP3OKP PBD mendapatkan penjelasan terkait Buku Saku Badan Pengarah Papua 3. BP3OKP PBD mendapatkan informasi terkait alokasi anggaran dana Pokja Tahun 2025 4. BP3OKP PBD dan KPPN Sorong mendiskusikan beberapa hal, salah satunya terkait permohonan penyediaan kendaraan operasional untuk Pokja, dsb
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Perlu adanya pertemuan bulanan antara Anggota BP3OKP PBD, Anggota Pokja dan KPPN Sorong selaku Tim Dukungan Administratif (untuk membahas terkait kendala-kendala, update saldo/anggaran tersisa, dsb) 2. Perlu diskusi terkait teknis pelaksanaan peluncuran anggaran 3. Peran KPPN Sorong sebagai Tim Dukungan Administratif perlu untuk lebih maksimal dalam mendukung kegiatan-kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
Dokumentasi	

17) Kegiatan 17

Nama Kegiatan	Penguatan Tugas dan Fungsi BPP dalam Mengawal Percepatan Pembangunan Papua
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	26 Februari 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya via <i>Teams Meeting</i>
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri undangan dengan bahasan penguatan tugas dan fungsi BP3OKP berdasarkan PMK Nomor 33 Tahun 2024
Peserta Kegiatan	Anggota BP3OKP 6 Wilayah; Kepala Sekretariat BPP Manokwari; Kepala KPPN Wilayah DOB; Para Anggota Pokja BP3OKP; Kementerian Keuangan RI
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	SHEK Internal
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP
Hasil Kegiatan	BP3OKP PBD menerima sosialisasi dan pendampingan terkait PMK Nomor 33 Tahun 2024. Pendampingan dan penyamaan persepsi tentang efisiensi anggaran yang sedang terjadi, yang didasarkan pada Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Selain itu, BP3OKP PBD juga mendapatkan pendampingan terkait kebijakan tatakelola dana Otonomi Khusus Papua.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjuti	1. Peran dan tusi BP3OKP perlu diselaraskan dengan reformasi tata kelola dana Otonomi Khusus yang baru (paradigma baru) 2. Perlu adanya sinergi antara BP3OKP dan Kepala Daerah dalam mengawal pelaksanaan percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus di wilayah Papua 3. Perlu adanya pertemuan/koordinasi dengan Kepala Daerah dalam rangka implementasi PMK Nomor 33 Tahun 2024 4. Perlu adanya workshop secara detail tentang tata cara pendampingan BP3OKP terhadap Pemda, dimulai sejak tahap perencanaan program, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi terhadap dana TKD 5. Perlu adanya <i>roadmap</i> (alur kerja) dana TKD serta <i>timelinenya</i> guna mempermudah BP3OKP dalam

	mengontrol/monitoring tahapan pemenuhan syarat salur
Dokumentasi	

18) Kegiatan 18

Nama Kegiatan	Audiensi Bersama UMKM Mitra Tani Kabupaten Sorong Selatan (Milik Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	26 Februari 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menerima permohonan audiensi dan berkoordinasi terkait produk sagu
Peserta Kegiatan	Anggota BP3OKP PBD; Anggota Pokja BP3OKP PBD (Sehat, Cerdas, Produktif); Pihak UMKM Mitra Tani Kabupaten Sorong Selatan
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP dan Misi RIPPP (Produktif)
Hasil Kegiatan	BP3OKP PBD mendapatkan informasi terkait UMKM Mitra Tani Kabupaten Sorong Selatan. Informasi yang diperoleh yakni profile dan produk-produk yang dijual. UMKM Mitra Tani merupakan kelompok usaha yang mengelola makanan ringan dari bahan baku sagu dan pisang, yang dalam pengelolaannya melibatkan ibu-ibu rumah tangga sekitar.

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjuti	1. Perlu adanya koordinasi lanjut bersama dinas terkait di Kabupaten Sorong Selatan untuk memberikan dukungan kepada pelaku usaha (UMKM Mitra Tani) 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan perlu untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal seperti UMKM Mitra Tani tersebut 3. Proses pengajuan izin BPOM dan peningkatan penyaluran produk perlu dukungan dari pihak dinas terkait maupun pemda Kabupaten Sorong Selatan
Dokumentasi	

19) Kegiatan 19

Nama Kegiatan	Rapat Koordinasi Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	27 Februari 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Mensosialisasikan BP3OKP, Membangun sinergitas, Diskusi dan koordinasi program nasional termasuk program MBG serta program lainnya
Peserta Kegiatan	Anggota BP3OKP PBD; Anggota Pokja BP3OKP PBD (Sehat, Cerdas, Produktif); Usulan/Calon Anggota Pokja BP3OKP PBD (Alberd Duwith); PPNPN BP3OKP PBD; Pihak FKUB PBD
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi

Misi/Keterangan	Misi BP3OKP dan Misi RIPPP (Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	1. BP3OKP PBD mensosialisasikan terkait kelembagaan BP3OKP 2. BP3OKP PBD menyampaikan terkait kinerja/kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan 3. BP3OKP PBD menyampaikan isu-isu strategis di Provinsi Papua Barat Daya, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) 4. BP3OKP PBD menyampaikan terkait permohonan dukungan dalam rangka pelaksanaan program MBG di Provinsi Papua Barat Daya 5. BP3OKP PBD menyampaikan terkait peran-peran yang dapat dilakukan oleh FKUB dalam pelaksanaan program MBG 6. Respon FKUB : a. Menyatakan kesiapan dalam mendukung pelaksanaan program MBG di PBD b. Menyampaikan bahwa apabila ada program-program pemerintah sebaiknya perlu ada sosialisasi c. Perlu adanya pertemuan dengan Keuskupan Manokwari-Sorong dalam rangka kolaborasi pada pelaksanaan program MBG di PBD d. Menyampaikan terkait kendala-kendala yang dihadapi, salah satunya yakni terkait pengelolaan/manajemen klinik kesehatan milik organisasi keagamaan yang bermasalah sehingga, perlu adanya pendampingan bagi berbagai klinik yang dikembangkan oleh organisasi keagamaan di wilayah Papua Barat Daya
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Pembentukan Satgas MBG dan Satgas Ketahanan Pangan perlu keterlibatan dari pihak organisasi keagamaan 2. BP3OKP PBD akan merencanakan akan melaksanakan pertemuan dengan Keuskupan Manokwari-Sorong

	3. Organisasi keagamaan sebaiknya sudah dapat mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan dalam rangka kolaborasi pelaksanaan program MBG seperti melaksanakan proses pembelajaran terkait tata cara pengaturan/manajemen pengelolaan dapur
Dokumentasi	

20) Kegiatan 20

Nama Kegiatan	Giat Wawancara Bersama Wartawan Suara Papua
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	27 Februari 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menerima permohonan wawancara dari pihak wartawan
Peserta Kegiatan	Anggota BP3OKP PBD; Anggota Pokja BP3OKP PBD (Sehat, Cerdas, Produktif); Usulan/Calon Anggota Pokja BP3OKP PBD (Alberd Duwith); Pihak Wartawan Suara Papua
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP
Hasil Kegiatan	BP3OKP PBD menerima wawancara terkait Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. BP3OKP PBD menyampaikan bahwa pelaksanaan anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi perlu untuk memperhatikan prinsip efisiensi. Selain itu, BP3OKP PBD menyampaikan terkait tugas dan fungsinya serta kinerja

	yang telah dilaksanakan (baik secara keseluruhan maupun sesuai misi RIPP-Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif).
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjuti	1. BP3OKP PBD akan terus melakukan sharing informasi terkait kebijakan pemerintah kepada media publikasi dengan meningkatkan peran wartawan sebagai media publikasi 2. Perlu publikasi secara berkala terkait peran dan kinerja BP3OKP PBD
Dokumentasi	

21) Kegiatan 21

Nama Kegiatan	Audiensi (Diskusi) Bersama Danrem 181/PVT
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	28 Februari 2025 di Danrem 181/PVT
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Membangun sinergitas dan koordinasi terkait program MBG di Provinsi Papua Barat Daya
Peserta Kegiatan	Anggota BP3OKP PBD; Anggota Pokja BP3OKP PBD (Cerdas, Produktif); Usulan/Calon Anggota Pokja BP3OKP PBD; Danrem 181/PVT
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP dan Misi RIPP (Produktif)
Hasil Kegiatan	1. Sinergitas antara BP3OKP PBD dan Korem 181/PVT 2. BP3OKP PBD mendapatkan informasi terkait Korem 181/PVT

	3. Koordinasi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan baik 4. Usulan BP3OKP PBD : perlu keterlibatan dari kelembagaan gereja dalam pelaksanaan program MBG di PBD, perlu dibentuk 2 satgas yakni satgas MBG dan satgas ketahanan pangan
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Satgas perlu untuk segera dibentuk 2. Perlu adanya koordinasi lebih erat lagi antara peran Bhabinkamtibmas dan instansi terkait (penyuluh pertanian) terkait satgas ketahanan pangan 3. Segera bangun kolaborasi dengan kelembagaan gereja untuk pelaksanaan program MBG di Provinsi Papua Barat Daya
Dokumentasi	

2.2 Capaian

Bulan Februari 2025 menjadi periode penting dalam mengevaluasi kelanjutan pencapaian kinerja yang telah diraih sejak tahun 2024 dan bulan Januari 2025. Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam mencapai visi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041 yakni “Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera”. Capaian pada bulan Februari ini tidak hanya mencerminkan hasil dari pelaksanaan tugas-tugas sebelumnya, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk mempertahankan momentum dan menyempurnakan setiap langkah yang telah diambil.

Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang telah tercapai pada bulan Februari 2025 memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan dan tantangan yang dihadapi, serta dasar yang kuat untuk menetapkan langkah strategis berikutnya. Beberapa capaian di bulan ini antara lain :

No	Misi	Uraian Capaian
1	BP3OKP PBD	BP3OKP PBD telah bersinergi dan berkolaborasi dengan baik bersama Pemerintah Pusat K/L, Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi, Kab/Kota maupun OPD dan Stakeholder terkait dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya. Beberapa diantaranya yaitu : 1. BP3OKP PBD telah menindaklanjuti arahan dari Asisten Deputi Bidang Politik, Kemanan, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (PKHHAM) Sekretariat Wakil Presiden terkait isu strategis usulan tanah hibah untuk program pembangunan 3 juta rumah dari organisasi Masyarakat Pendukung Gibran (MPG). BP3OKP PBD melaksanakan pertemuan/rapat terkait isu strategis tersebut dengan pihak-pihak yang bersangkutan. 2. BP3OKP PBD telah berkoordinasi dengan Wamendagri terkait isu strategis pembangunan 3 juta rumah, pelaksanaan program MBG di Provinsi Papua Barat Daya dan isu-isu strategis lainnya. 3. BP3OKP PBD telah berkoordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam rangka membangun sinergitas dan kolaborasi bersama guna memperlancar proses dan keberhasilan pelaksanaan percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya. 4. BP3OKP PBD juga ikut serta/berpartisipasi dalam kegiatan Peresmian Kegiatan DAK Fisik dan Non Fisik Tahun 2023, 2024,

		2025 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
2	Papua Sehat	1. Sebagai tindaklanjut kegiatan Sosialisasi Akreditasi RSU Kelas D Pratama Kab. Tambrauw yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2024 lalu, BP3OKP PBD telah membantu pihak RSU Kelas D Pratama Kab. Tambrauw dalam proses akreditasi rumah sakit. Awalnya, diinformasikan bahwa hasil survei akan diterima pada bulan Mei 2025. Namun, hasil survei ternyata telah diterima pada bulan Februari 2025 ini, dengan hasil, RSU Kelas D Pratama Kab. Tambrauw berhasil meraih akreditasi dengan tingkat kelulusan “Paripurna”.  2. Pada tanggal 4 Februari 2025, BP3OKP PBD menerima permohonan audiensi dari Pihak RSUD Scholoo Keyen Kab.

		Sorong Selatan. Pihak RSUD menyampaikan terkait kendala yang dihadapi yakni terjadi kekosongan dokter spesialis. Menindaklanjuti hal tersebut, BP3OKP PBD melakukan koordinasi dan konsultasi di tingkat pemerintah pusat yaitu Kementerian Kesehatan RI. Hasil dan rekomendasi-rekomendasi yang telah diperoleh, selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan tuis SHEK bersama Pihak RSUD Scholoo Keyen Kab. Sorong Selatan. 3. BP3OKP PBD juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI bidang Biro Perencanaan dan Anggaran terkait follow up usulan RS UPT Vertikal Kemenkes di Provinsi Papua Barat Daya serta isu-isu strategis perencanaan lainnya. Hasil dan rekomendasi-rekomendasi yang telah diperoleh, selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan tuis SHEK bersama Pihak/OPD Terkait.
3	Papua Cerdas	1. Sebagai salah satu implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 mengenai Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023, BP3OKP PBD telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi khususnya dengan bagian Direktorat Kelembagaan terkait pendirian akademi komunitas. Hasil dan rekomendasi-rekomendasi yang telah diperoleh, selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan tuis SHEK bersama Pihak/OPD Terkait. 2. BP3OKP PBD juga melaksanakan koordinasi bersama LPDP terkait Beasiswa LPDP dengan kategori Afirmasi bagi Putra/I Papua. Hasil dan rekomendasi-rekomendasi yang telah diperoleh, selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan tuis SHEK bersama Pihak/OPD Terkait.
4	Papua Produktif	1. Dalam rangka pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), BP3OKP PBD membangun sinergi dengan pemerintah pusat dalam hal ini adalah Badan Gizi Nasional. Selain membangun sinergitas, dalam rangka pelaksanaan program MBG di Provinsi Papua Barat Daya, BP3OKP PBD

		telah melaksanakan koordinasi dengan BGN terkait permohonan mekanisme/petunjuk teknis (juknis) guna mendukung pelaksanaan program tersebut. 2. Pada tanggal 26 Februari 2025, BP3OKP PBD menerima permohonan audiensi dari UMKM Mitra Tani Kabupaten Sorong Selatan. Pihak UMKM menyampaikan terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan/manajemen usaha. Salah satu hal yang direkomendasikan oleh BP3OKP PBD adalah perlunya dukungan dari Pemerintah Daerah terhadap pelaku usaha ekonomi lokal, apabila usaha ekonomi lokal dapat berjalan dengan optimal maka, dapat menurunkan angka tingkat kemiskinan pada daerah tersebut. 3. Kolaborasi BP3OKP PBD bersama Korem 181/PVT dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua Barat Daya. BP3OKP PBD menginisiasi keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan program tersebut termasuk keterlibatan dari organisasi keagamaan.
5	Papua Polhukam (Damai)	BP3OKP PBD ikut serta/berpartisipasi pada kegiatan Simposium Regional Penyiapan Usulan Rancangan Perda Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat Daya yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Bentang Alam Papua PBD pada tanggal 18 Februari 2025. BP3OKP PBD memberi rekomendasi tindaklanjut yakni perlu untuk segera dibentuk Tim Lintas Sektorial guna mendorong Peraturan Daerah Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua Barat Daya.

Melalui uraian capaian di atas, dapat digali pembelajaran dari pelaksanaan tugas yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk mencapai target yang lebih tinggi di masa mendatang. Capaian di bulan Februari ini juga merupakan refleksi dari upaya kolaboratif dan kerja keras yang terus dipupuk sejak awal pelaksanaan tugas BP3OKP hingga saat ini.

BAB III

PENUTUP

Demikian laporan ini disusun dan disampaikan, sebagai laporan realisasi sekaligus pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BP3OKP dengan periode waktu bulanan yakni bulan Februari tahun 2025.

Diharapkan laporan ini dapat membawa manfaat bagi BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya dalam evaluasi kinerja dan peningkatan kinerja ke depannya, serta bermanfaat bagi Wakil Presiden RI selaku Ketua Badan Pengarah Papua (BPP), Sekretaris Eksekutif Badan Pengarah Papua (BPP) dan Sekretariat Badan Pengarah Papua (BPP) dalam monitoring kegiatan BPP/BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya.